Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata

Check Criteria and Bilyet Giro in Business Transactions That Result in Consequences of Criminal and Civil Law

Ferdy Saputra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia

Diterima: Februari 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019

*Corresponding Email : ferdysaputraagani@vmail.com

Abstrak

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang menimbulkan akibat hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata, maka cek dan bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan. Kaitan tersebut dikarenakan, bank-bank pemerintah maupun swasta adalah pihak yang menerbitkan cek dan bilyet giro tersebut. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro, khusus mengenai kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum swasta/keperdataan.

Kata Kunci: Cek dan Bilyet Giro; Transaksi Bisnis; dan Konsekuensi Hukum

Abstract

In the use of checks and bilyet giro as collateral for debt which results in legal consequences, both in the form of criminal law and civil law, checks and bilyet giro as bank products are closely related to banking law. The link is due to the fact that state and private banks are the parties that issue checks and bilyet giro. As a result of the use of checks and demand deposits that develop within the community, banks as issuers of checks and giro checks are often made to participate in legal issues carried out by their customers. Bank participation in legal matters, at a minimum, provides Investigators with information about checking accounts on behalf of their customers. Therefore, it is necessary to regulate the banking sector which regulates the use of checks and bank notes, specifically on what usage criteria can be categorized as criminal acts, and vice versa which use criteria can be categorized as private / civil legal relations.

Keywords: *Cheque and Bilyet Giro; Business Transaction; and Legal Consequences*

How to Cite: Saputra, F. (2019). Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1): 27 – 39

PENDAHULUAN

Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut Pasal 178 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pada intinya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk (Pasal 178 KUHD angka 2 dan 3). Sedangkan, Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, yang pada intinya menyatakan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/ dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian, cek adalah pembayaran tunai dan langsung, sedangkan bilyet giro adalah transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk.

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Bagi orang yang mengeluarkan cek dan ataupun bilyet giro apabila dalam satu transaksi bisnis membutuhkan jumlah uang yang banyak tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar.

Praktek penggunaan cek dan bilyet giro pada masyarakat saat ini, apabila pinjam-meminjam uang terjadi diantara kreditur dan debitur, digunakan sebagai jaminan bagi debitur kepada kreditur. Tujuannya adalah untuk mempermudah apabila terjadi wanprestasi. Jika, cek dan bilyet giro tidak dapat diuangkan/dikliringkan, maka terhadap utang yang tidak dibayar, pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum secara pidana berupa laporan polisi. Hal ini dikarenakan apabila penyelesaiannya

dilakukan melalui upaya hukum secara perdata akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga, pada saat sekarang ini kedudukan cek yang digunakan oleh debitur sebagai jaminan utang yang diberikan kepada kreditur, hanya sebagai bentuk janji bayar yang belum tentu cek tersebut dapat dicairkan.

Terkait dengan jaminan utang, dahulu sering digunakan debitur sebagai peminjam adalah berupa jaminan kebendaan yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak (Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terhadap jaminan berupa barang bergerak disebut fidusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sedangkan terhadap jaminan barang tidak bergerak disebut hak tanggungan atau dahulu dikenal hipotik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang yang menimbulkan akibat hukum pidana maupun hukum perdata, maka cek dan bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan (Kamello, 2006). Hal tersebut dikarenakan, bank-bank pemerintah maupun swasta adalah pihak yang menerbitkan cek dan bilyet giro tersebut. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro, khusus mengenai kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya

kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum swasta/keperdataan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Teori perbuatan melawan hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami perpindahan konteks perbuatan melawan hukum secara perdata dan konteks perbuatan melawan hukum secara pidana. Sejarah perpindahan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dapat ditemui pada Arrest Lindenbaum yang pada inti kaidah hukumnya, pada saat peristiwa apa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata, dan perbuatan melawan hukum secara pidana.

Berdasarkan literatur-literatur perbuatan melawan hukum, kasus Lindenbaum-Cohen menjadi salah satu rujukan yang paling sering disinggung. Putusan perkara tersebut dirujuk ketika hendak menentukan kriteria atau cakupan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kasus ini diputus Hoge Raad Belanda pada tahun 1919 (Raad, 1919). Putusan tersebut, menjadi tonggak perubahan pandangan pengadilan terhadap *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata. Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang

bertentangan dengan (Setiawan, 1987): "Hak subyektif orang lain; Kewajiban hukum pelaku; Kaedah kesusilaan; dan Kepatutan dalam masyarakat".

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, dalam Buku III KUH.Perdata, pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat (Agustina, 2003): "Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kesusilaan; dan Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian".

Mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum" dari Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut di atas, masih menurut Rosa Agustina, dalam praktek Pasal 1365 KUH.Perdata sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*wedderrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan, menjadi (Kartanegara, 2005): "*Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan, *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*)".

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah,

berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh: Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh: Pasal 351 KUHP) (Abidin & Hamzah, 2010).

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Untuk itu, sebagai referensi, menurut Munir Fuady, menyatakan bahwa (Fuadi, 2005):

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata), maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya. Sehingga, penggunaan cek dan bilyet giro dalam hubungan bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata maupun perbuatan pidana harus dilihat dari sifat penggunaannya. Apabila perbuatan tersebut harus melanggar kepentingan umum barulah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Namun, apabila perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, maka penggunaan cek dan bilyet giro tersebut harus hanya melanggar kepentingan pribadi saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis telah memberikan akibat hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan bagaimana perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sumber hukum yang ada hanya berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia.

Memang dahulu ada pengaturan yang melarang menggunakan cek kosong sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Hal ini membuat stigma di masyarakat bahwa setiap orang yang menggunakan cek kosong dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur dan diancam sanksi berat bagi orang yang menggunakan cek kosong. Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menyatakan bahwa:

“Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bagi orang yang mengeluarkan cek kosong adalah tindak kejahatan sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Cek kosong menurut ketentuan tersebut adalah cek yang ditarik yang pada waktu

penarikannya tidak didukung dengan dana yang cukup. Menurut karakteristik cek, memang pada waktu cek ditarik sudah harus ada dananya pada waktu penarikan oleh penerima. Inilah yang menjadikan keengganan masyarakat dalam penggunaan cek, sehingga lahirlah produk pembayaran berikutnya yaitu "Bilyet Giro" sebagai produk bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti cek (Prasetyo, 2004).

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadikan ketentuan tersebut berubah. Sejak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tersebut, maka tindak pidana cek kosong bukan lagi termasuk tindak pidana perbankan, melainkan tindak pidana umum. Oleh karenanya dengan telah dicabutnya ketentuan tentang larangan penarikan cek kosong, tidak membuat masyarakat menjadi seenaknya saja menggunakan cek kosong (Alinea ke-7, ke-8, dan ke-9 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong).

Ada ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memang dengan sengaja menerbitkan cek kosong, yaitu: Pasal 1321 Jo. Pasal 1328 KUH.Perdata, yang pada intinya menggariskan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian dengan unsur penipuan, patut diketahuinya bahwa dirinya tidak akan dapat membuat perjanjian itu apabila tidak terdapat unsur penipuan, maka terhadap unsur penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini membuat hubungan bisnis dalam bentuk perjanjian dalam lingkup hubungan hukum swasta (perdata) ternyata dapat dimasuki oleh hukum pidana. Artinya, terhadap perjanjian yang demikian

tersebut dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian RI untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan di dalam pembuatan perjanjian tersebut oleh para pihak.

Kembali kepada yurisprudensi yang digunakan untuk menentukan kategori pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata. Di dalam praktek hukum, terdapat istilah yurisprudensi yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Putusan-putusan pengadilan tersebut tidak langsung menimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai faktor dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Kebiasaan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau yurisprudensi (Suroso, 1993).

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dikelompokkan yurisprudensi penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana dan yurisprudensi penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata, antara lain : 1) Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata, yaitu (Julisman, 2017); Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93 K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970, kaidah hukumnya adalah: "Bahwa suatu perkara tentang utang piutang merupakan sengketa perdata, bukan perkara pidana"; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1061 K/Pid/1990 tertanggal 26 Juli 1990, kaidah hukumnya adalah: "Bahwa perkara ini adalah masalah perdata yaitu utang piutang antara Terdakwa Hindarto Salim (debitur) dengan Edy Senelius (kreditur) yang dihubungkan dengan Akta Jual Beli Notaris No. 153 yang kemudian disusul dengan Jual Beli No. 2975 Saham PT.

Asuransi Gajah Mada milik Hindarto kepada Eddy Senelius di hadapan Notaris yang sama, jelas hal ini merupakan masalah perdata”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 411 K/Pid/1992 tertanggal 28 April 1997, kaidah hukumnya adalah: “Bahwa apabila dalam suatu perkara mengandung aspek yang bersifat keperdataan, maka penyelesaian secara hukum perdata harus lebih dahulu dikedepankan sebelum dilakukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum pidana”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 449 K/Pid/2001, tertanggal 17 Mei 2001, kaidah hukumnya adalah: “Bahwa dengan adanya penyerahan mobil tersebut sebagai jaminan hutang, maka tentunya tidak ada suatu peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai suatu penipuan secara berlanjut”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/Pid/2008, tertanggal 22 Mei 2008, kaidah hukumnya adalah: “dst... sebab hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi adalah hubungan hukum perdata, berupa utang piutang yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa ...dst. Bahwa, sisa uang keuntungan yang belum dikembalikan Terdakwa merupakan perbuatan ingkar janji”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2161/Pid/2008, tertanggal 14 Mei 2009, kaidah hukumnya adalah: “Bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014, tertanggal 16 Februari 2015, kaidah hukumnya adalah: “Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan pinjam-meminjam uang yang ada dalam domain hukum perdata. Terdakwa telah mencicil pembayaran

utang sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan cicilan kedua melalui Saksi David alias Akiat sebesar Rp. 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi tidak diserahkan oleh Saksi David kepada Saksi Korban dan dalam pinjam-meminjam uang tidak melalui perjanjian tertulis itu tidak disebutkan batas waktu pelunasan”;

Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/PDT/2011, tertanggal 23 Juni 2011, kaidah hukumnya adalah: “Bahwa meskipun Tergugat berutang, akan tetapi bila terjadi wanprestasi harus diselesaikan secara hukum bukan dengan cara mengambil barang milik Tergugat”.

Beberapaurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas merupakan perkara pidana tentang cek kosong yang telah terlanjut memasuki persidangan, namun Majelis Hakiim telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Dengan kata lain, perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah perdata yang penyelesaiannya melalui upaya hukum berupa gugatan keperdataan.

KUHAP mengenal dua jenis putusan yang tidak bersifat pemidanaan, yaitu: putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstslag van rechtsvervolging*). Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Sedangkan putusan lepas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Dalam tindak pidana penipuan yang mengandung unsur wanprestasi pada umumnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Artinya, semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan relevan dengan perbuatan materiil yang didakwakan. Namun apakah memang demikian? Dalam rumusan Pasal 378 KUHP, bahwa “melawan hukum” menjadi bagian dari unsur tindak pidana, sehingga untuk terbuktinya Pasal 378 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan dalam wanprestasi tidak mengandung unsur melawan hukum, melainkan hanyalah unsur melawan perikatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, unsur “melawan perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Pasal 1338 KUH.Perdata, menyebutkan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat “sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya?”, jika dilihat makna dari frase pasal tersebut, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat

yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja. Artinya, meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnya dengan undang-undang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan sebagai undang-undang yang dapat berlaku secara umum. Makna dari “kekuatan mengikatnya sebagaimana undang-undang” semata-mata terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian dihadapan pengadilan negara seperti halnya terhadap orang yang telah melanggar undang-undang.

Secara umum “melawan hukum” (dalam konteks hukum pidana) dengan “melawan perikatan” (hukum perdata) memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya; 1) Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda, maupun bunga; 2) Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat

melawan hukum dalam konteks hukum perdata, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut. Setiap penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan) merupakan suatu pelanggaran prosedur (*undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku.

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana, yaitu (Julisman, 2017): 1) "Arrest Hoge Raad W. 9145, tertanggal 01 November 1920, kaidah hukumnya adalah: "Bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar"; 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973, tertanggal 15 November 1978, kaidah hukumnya adalah: "Bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP"; 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989, tertanggal 31 Agustus 1992, kaidah hukumnya adalah: "Bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti".

Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH.Perdata. Sedangkan, delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP memiliki rumusan, sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan".

Suatu perbuatan dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 KUH.Perdata, bahwa: "Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan". Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan tersebut dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio, bahwa (Satrio, 1995): "Suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan yang daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa antara penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dalam konteks hukum perdata dengan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dalam konteks hukum pidana, atau dengan kata lain antara wanprestasi dengan delik penipuan memiliki karakteristik perbuatan materiil yang berbeda, baik dari unsur-unsur perbuatannya, maupun dari penyebab

lahirnya perbuatan tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membedakan keduanya, antara lain: 1) Sifat melawan hukum dalam tindak pidana penipuan tidak sama dengan sifat melawan hukum dalam suatu perjanjian yang terkandung dalam perbuatan wanprestasi; 2) Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/aturan yang berlaku secara umum, sedangkan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku khusus yang dibuat/diperjanjikan oleh para pihak pembuatnya; 3) Tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perikatan pokok; 4) Penyerahan suatu prestasi karena kewajiban suatu perjanjian tidak sama dengan penyerahan prestasi karena tipu muslihat yang dilakukan untuk mempengaruhi kehendak seseorang dengan suatu kebohongan/ keadaan palsu agar mau menyepakati perjanjian; 5) Dengan tidak adanya unsur melawan hukum dan unsur menggerakkan orang lain dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka perkara penipuan yang mengandung unsur wanprestasi lebih tepat jika diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) dengan alasan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.

Berangkat dari uraian-uraian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata dan pidana, maka untuk menjawab kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang bagaimana digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa

hukum pidana maupun hukum perdata, atau dengan kata lain kriteria dan kedudukan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, memang dahulu dalam rentang waktu tahun 1964 s.d. 1971 barangsiapa menarik cek, padahal ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro miliknya, maka perbuatan penarik cek kosong tersebut adalah kejahatan dan termasuk kategori "tindak pidana perbankan" yang diancam dengan sanksi pidana berat yaitu pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal 4 (empat) kali jumlah nilai yang ditulis di atas cek kosong tersebut (Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.).

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, maka penarikan cek kosong tidak lagi dikategorikan melakukan "kejahatan" dan tidak dikualifikasikan dalam tindak pidana perbankan.

Walaupun penarikan cek kosong tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan (tindak pidana perbankan), akan tetapi di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) ketentuan tersebut ditegaskan juga bahwasanya penggunaan cek kosong tersebut tidak menghapus pidananya atau dengan kata lain penarikan cek kosong tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya

tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan M.v.T. dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing : No. 93 K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970; No. 1061 K/Pid/1990, tertanggal 26 Juli 1990; No. 411 K/Pid/1992, tertanggal 28 April 1997; No. 449 K/Pid/2001, tertanggal 17 Mei 2001; No. 424 K/Pid/2008, tertanggal 22 Mei 2008; No. 2161/Pid/2008, tertanggal 14 Mei 2009; No. 1260 K/Pid/2014, tertanggal 16 Februari 2015; dan No. 372 K/PDT/2011, tertanggal 23 Juni 2011, yang pada intinya kaedah hukumnya penggunaan cek kosong tidak dapat dikategorikan seluruhnya sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, melainkan harus dilihat peristiwa per peristiwa, sehingga terdakwa-terdakwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang telah terlanjur disidangkan, padahal perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderechtelijkheid*), maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*onslag van rechtsvervoelging*), melainkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia tersebut juga bersesuaian dengan M.v.T. Alinea ke-8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong yang menyatakan bahwa penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata, maka tidak semua penarik cek

kosong dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, oleh karenanya harus dilihat peristiwa per peristiwanya sesuai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Adapun kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang menimbulkan akibat hukum dalam konteks pidana maupun akibat hukum dalam konteks perdata terdapat dua perbuatan, yaitu: Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Perdata Yang Dikenal Dengan Sebutan *Onrechtmatigedaad*.

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP. Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *wedderechtelijkheid* yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP. Sehingga, penggunaan cek dan bilyet giro kosong tersebut bukanlah *wedderechtelijkheid* akan tetapi adalah *onrechtmatigedaad*. Sebagai salah satu contoh terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, yaitu : apabila penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya dari *wedderechtelijkheid* menjadi

onrechtmatiggedaad. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri.

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Pidana Yang Dikenal Dengan Sebutan *Wedderechtelijkheid*

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *wedderrechtelijkheid* yaitu apabila perbuatan seorang penarik cek kosong telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP. Sebagai contoh : penarik cek yang telah “patut diketahuinya” dan dengan “keadaan sadar” mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada orang lain, padahal diketahuinya pada saat cek tersebut ditariknya/ dituliskannya, dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak cukup, maka perbuatannya tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP, namun harus dilihat peristiwa per peristiwa kenapa cek dan bilyet giro tersebut dikeluarkan.

Akan tetapi, jika perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, maka perbuatannya dikategorikan sebagai *onrechtmatiggedaad*. Dengan kata lain, dalam hukum pidana suatu perbuatan harus dibuktikan terlebih dahulu “niat” (*mens rea*) dari penarik cek kosong tersebut apakah memang penarik memang berniat untuk melakukan tindak pidana terhadap penerima atau tidak.

Dengan kata lain, dengan “tidak adanya niat” apalagi “dapat dibuktikan adanya pembayaran” yang dilakukan oleh Penarik selaku debitur kepada Penerima selaku kreditur walaupun “hanya

sebahagian” telah merubah kategori perbuatan melawan hukum debitur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana menjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sebaliknya, apabila sejak dari awal penarikan cek kosong, penarik “telah mempunyai niat” untuk melakukan penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai “alat melakukan tindak pidana” dan “dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun” terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Oleh karena dengan telah ditemukannya titik perbedaan ini, maka bagi penegak hukum, yaitu: penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan hakim dapat dengan mudah menentukan kategori perbuatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*wedderrechtelijkheid*) dan kategori yang bagaimana sebagai perbuatan perdata (*onrechtmatiggedaad*). Karena peraturan mengenai cek dan bilyet giro hingga sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat menentukan titik singgung kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

SIMPULAN

Kriteria cek dan bilyet giro dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana maupun hukum perdata, secara umum sifat melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderrechtelijkheid*) dengan sifat melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatiggedaad*) memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada “niat” (*mens rea*) dari Penarik apakah cek dan bilyet giro kosong digunakan sebagai “alat untuk melakukan tindak pidana” dan

termasuk ke dalam rangkaian perkataan bohong dan martabat palsu sehingga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Namun, apabila dari awal penarik tidak mempunyai “niat” untuk tidak melakukan pembayaran dan ditindaklanjuti dengan adanya suatu pembayaran sekecil apapun untuk melakukan pembayaran atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkan oleh penarik, maka perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perbuatan konteks pidana, melainkan termasuk dalam perbuatan konteks perdata (*onrechtmatiggedaad*) yang diselesaikan dengan jalur keperdataan.

Sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut, maupun hakim dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., & Hamzah, A. (2010), Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Agustina, R. (2003) *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia, 2003.
- Agustina, R. (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia.
- Fuady, M. (2005) *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005), *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Julisman, (2017), “Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Oktober 2017.
- Kamello, T. (2006), *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni.
- Kamello, T. (2006), *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni.
- Marpaung, L. (2005), *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetya, R. (2004), “Dasar Pemikiran Pengaturan KUHD Atas Surat Berharga”, Makalah disajikan dalam pertemuan “Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) Dalam Sistem Pembayaran” diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal 28-29 April 2004.
- Prasetya, R. (2004), “Dasar Pemikiran Pengaturan KUHD Atas Surat Berharga”, Makalah disajikan dalam pertemuan “Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) Dalam Sistem Pembayaran” diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal. 28-29 April 2004, hlm. 153.
- Satrio, J. (1995), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, (1987) “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, *Varia Peradilan No. 16, Tahun II*, Januari 1987, hlm. 176.
- Setiawan, (1987), “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, *Varia Peradilan No. 16, Tahun II*, Januari.
- Soeroso, R. (1993), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Bank Indonesia, Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 tertanggal 04 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000 perihal: Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang ditujukan kepada Semua Bank Peserta Kliring di Indonesia.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP, tertanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro.

Putusan Pengadilan

Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014 tertanggal 16 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2882/Pid.B/2013/PN. Mdn tertanggal 24 Juli 2014 An. Dhani Setiawan Isma.